



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SINERGI ANTARA PUSAT-DAERAH DAN ANTARDAERAH

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Makassar, 8 Maret 2010

1

Pendahuluan

- Sinergi Pusat-Daerah dan AntarDaerah khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan antara Bappenas dan Bappeda Provinsi dan Antar Bappeda Provinsi se-KTI sangat diharapkan menjadi lebih baik dan lebih erat di waktu-waktu mendatang, demi terwujudnya visi, misi, dan program-program pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Pendahuluan

- Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang terbatas.
- Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Tugas sebagai lembaga perencanaan baik di tingkat nasional maupun daerah adalah untuk menjamin bahwa formulasi, rancangan, dan implementasi rencana-rencana pembangunan adalah konsisten dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan dan disepakati di tingkat nasional dan sesuai dengan prioritas daerah yang telah dituangkan dalam RPJMN 2010-2014.

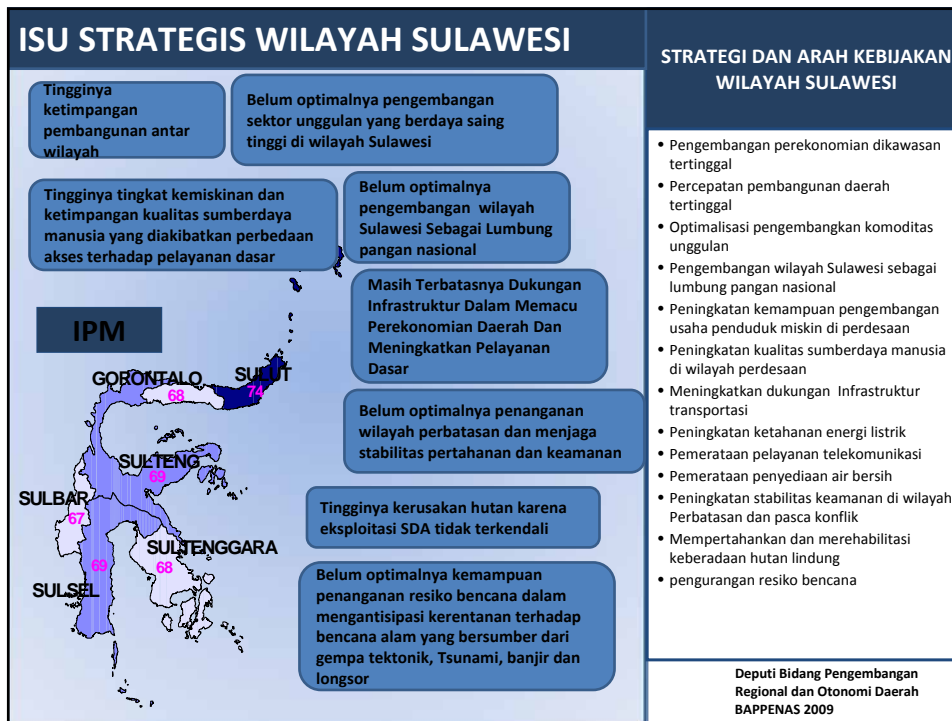
Peranan Bappenas dan Bappeda Provinsi

3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan Bappenas dan Bappeda Provinsi untuk menjaga kualitas produk perencanaan.

- *Pertama*, tuntutan untuk semakin **melibatkan partisipasi masyarakat** dalam proses pengambilan keputusan dan adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan pembangunan;
- *Kedua*, perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah perlu **terintegrasi dalam perencanaan jangka panjang**;
- *Ketiga*, perlunya **memperhatikan kualitas data dan informasi yang akurat dan terkini** sebagai basis pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan.

Lanjutan

- Sistem perencanaan pembangunan nasional dituntut untuk mampu:
 1. mengalokasikan **sumberdaya** pembangunan kedalam **kegiatan-kegiatan** melalui **kelembagaan-kelembagaan** dalam konteks untuk mencapai **masa depan yang diinginkan**;
 2. **fleksible dengan horizon perencanaan** yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang;
 3. **memperluas dan mendiseminasikan kemampuan perencanaan** ke seluruh lapisan masyarakat.
- Misi yang cocok untuk dijalankan oleh suatu institusi perencanaan adalah:
 1. Menyusun sistem dan mekanisme proses perencanaan pembangunan nasional yang partisipatif, rasional, obyektif dan nonpartisan;
 2. Menyusun perencanaan yang komprehensif, terpadu dan fleksibel;
 3. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan nasional serta pelaksanaannya;
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan nasional.



ISU STRATEGIS WILAYAH NUSA TENGGARA

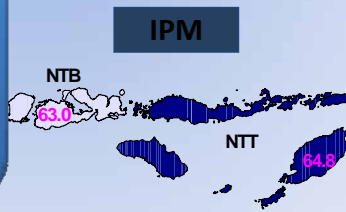
meningkatnya kebutuhan pengembangan pusat kegiatan nasional di Mataram dan Kupang dengan penopang perikanan laut dan pariwisata

meningkatnya kebutuhan pengembangan pusat kegiatan wilayah di Sumbawa Besar, Raba, dan Praya (Nusa Tenggara Barat) serta Ende, Ruteng, Labuhan Bajo, Soe, Waingapu, Kafemananu, dan Maumere (Nusa Tenggara Timur) sebagai resultante perikanan laut, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata.

tingginya konflik antar golongan yang didukung oleh organisasi massa

rendahnya kualitas sumberdaya manusia sebagai konsekuensi rendahnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah, rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat, serta rendahnya pendapatan per kapita

rendahnya kinerja tata pemerintahan yang baik



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN WILAYAH NUSA TENGGARA

- Pengembangan pusat kegiatan nasional di Mataram dan Kupang
- Pengembangan industri pengolahan rumput laut
- Pengembangan industri pengolahan jagung serta kakao
- Peningkatan akses infrastruktur
- Mengoptimalkan ekonomi lokal dan usah kecil
- Peningkatan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah
- Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat
- Meningkatkan jumlah peraturan daerah
- Penguatan kelembagaan kerjasama natar aparat kepolisian dan tokoh agama dan adat dalam penyelesaian konflik antar golongan

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS 2009

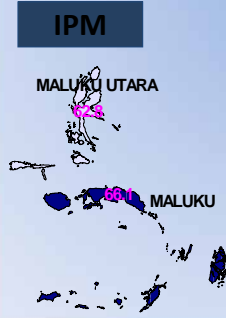
ISU STRATEGIS WILAYAH MALUKU

meningkatnya kebutuhan pengembangan pusat kegiatan nasional di Ambon, Ternate dan Sofifi sebagai resultante pusat pelayanan primer jasa pemerintahan, pusat pelayanan sekunder jasa pemerintahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pariwisata, dan perikanan laut.

rendahnya kualitas sumberdaya manusia sebagai konsekuensi rendahnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah, rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat, serta rendahnya pendapatan per kapita

tingginya dampak konflik Maluku terhadap keamanan lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi, serta lingkungan

rendahnya kemandirian pangan sebagai konsekuensi menurunnya luas areal dan produksi tanaman pangan.



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN WILAYAH MALUKU

- Pengendalian pengembangan kota Ambon dan Ternate - Sofifi, sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
- Peningkatan diversifikasi produk ke arah ikan siap saji untuk pasar dalam dan luar negeri
- Penganekaragaman produk olahan kelapa
- Penyusunan peraturan yang kondusif bagi penyaluran kredit usaha kecil
- Peningkatan akses penduduk terhadap sarana dan prasarana
- Pengembangan daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau terluar dan daerah rawan bencana
- Meningkatkan kapasitas Pemda dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam merespons Perda Tata Ruang
- Pengembangan sekolah menengah pertama dan menengah atas di daerah terpencil dan pulau kecil berpenghuni
- Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat

ISU STRATEGIS WILAYAH PAPUA

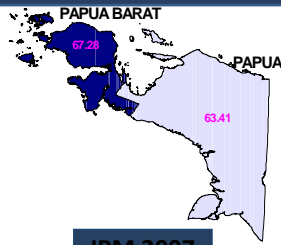
meningkatnya kebutuhan pengembangan perkotaan sebagai pusat kegiatan nasional di Timika, Jayapura (Papua) dan Sorong (Papua Barat) sebagai resultante pertambangan dan perikanan laut

belum optimalnya tata pemerintahan yang baik dalam koridor otonomi khusus.

rendahnya kualitas sumberdaya manusia sebagai konsekuensi rendahnya dan tidak meratanya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah, rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat, serta tidak meratanya pendapatan per kapita

belum terintegrasinya adat tradisional dalam proses pembangunan dan tata pemerintahan

tingginya potensi pelanggaran hak asasi manusia berbasis ikatan adat dan komunal.



IPM 2007

meningkatnya kebutuhan pengembangan perkotaan sebagai pusat kegiatan wilayah di Merauke, Ayamaru, Teminabuan, Biak, Nabire, Muting, Bade, Sarmi, Arso, Wamena (Papua) serta Fak-Fak, Manokwari (Papua Barat) sebagai resultante sektor pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pertambangan, dan kehutanan

tingginya keragaman hayati Pulau Papua

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN WILAYAH PAPUA

- Optimalisasi kebijakan dana otonomi khusus yang terkait dengan pengembangan sektor pengolahan sumberdaya alam
- Peningkatan kapasitas industri pengawetan dan pengalengan ikan
- Peningkatan nilai tambah dan industri pengolahan kakao dan kopi
- Peningkatan cakupan dan sebaran prasarana dan sarana
- Penyusunan peraturan daerah untuk mengimplementasikan UU Otonomi Khusus
- Pengembangan kapasitas Pemda dalam menjalankan prinsip-prinsip "good governance"
- Pembangunan fasilitas sekolah menengah pertama dan menengah atas di daerah terpencil dan pulau kecil berpenghuni
- Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat
- Penyusunan peraturan daerah tentang hukum adat
- Peningkatan kerjasama antara kepolisian dan pemuka adat dalam penanganan konflik

Memperkuat sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah.

- Beberapa **pokok-pokok arahan Bapak Presiden** dalam Musrenbang Nasional Penyusunan RPJMN 2010-2014 antara lain adalah:
 1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di tingkat pusat perlu mempertimbangkan keragaman kondisi dan dinamika kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik daerah;
 2. Perumusan kebijakan perlu didasarkan pada pemahaman yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang wilayah, serta komunikasi, koordinasi and konsultasi secara terus menerus dengan para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan di setiap daerah;
 3. Perlunya sinkronisasi substansi dan alokasi pembiayaan pembangunan antara Pusat dan Daerah;
 4. Perlunya koordinasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh rakyat di daerah, mempercepat pembangunan ekonomi daerah secara efektif dan berkelanjutan, memberdayakan pelaku dan potensi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah.

Lanjutan

- Sinergi dalam **kerangka kebijakan** pembangunan Pusat-Daerah dan Antardaerah diperlukan untuk menjamin:
 1. Koordinasi antarpelaku pembangunan di pusat dan daerah;
 2. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 3. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 4. Optimalnya partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan; dan
 5. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Upaya mewujudkan sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah baik lima tahunan maupun tahunan dilaksanakan melalui **optimalisasi proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional).**

Lanjutan

- Sinergi dalam **kerangka regulasi** berupa ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Upaya bersama Pusat dan daerah adalah:
 1. Konsultasi/koordinasi yang efektif dalam penyusunan peraturan perundangan;
 2. Pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan: baik penyusunan peraturan baru maupun review atas peraturan yang sudah ada;
 3. Fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perda yang bermasalah.
- Sinergi dalam **kerangka kelembagaan**, Pemerintah Pusat-Daerah perlu melakukan sinergi untuk:
 1. Sinergi dalam aktualisasi tata kewenangan antarstrata pemerintahan sebagai pijakan dasar penetapan kinerja dan alokasi anggaran dengan penerapan prinsip *money follows function* untuk kinerja pelayanan masyarakat secara bertanggung jawab;
 2. Sinergi dalam memantapkan unit manajemen daerah otonom atau pemekaran daerah melalui pengendalian pemekaran daerah berdasarkan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah dengan konfigurasi unit-unit manajemen pemerintahan daerah dalam format rentang kendali yang ideal secara fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
 3. Sinergi dalam peningkatan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan daerah serta antardaerah.

Lanjutan

- Dalam **kerangka pengembangan wilayah** diperlukan sinergi dalam pemantapan struktur ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah. Langkah cepat bersama Pusat-Daerah yang diperlukan adalah:
 1. Sinkronisasi kebijakan dalam penggunaan lahan dan tata ruang untuk menghindari tumpang tindih kebijakan;
 2. Memperkuat struktur ruang serta pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk mitigasi bencana alam;
 3. Meningkatkan perhatian pemda pada tata ruang;
 4. Mencegah ego kedaerahan untuk menghindari pembangunan prasarana dan sarana tanpa perhitungan harmonisasi wilayah pelayanan bersama-sama dengan kabupaten/kota tetangga;
 5. Pengaturan bersama alih fungsi lahan yang sangat dinamis melalui padu serasi dan penyelesaian segera aspek pemanfaatan ruang khususnya dengan sektor kehutanan;
 6. Penuntasan rencana tata ruang nasional yang mencakup sistem tataguna lahan dan sistem transportasi;
 7. Penuntasan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 8. Kesepakatan dalam penentuan lokasi wilayah-wilayah cepat tumbuh terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Lanjutan

- Dalam aspek **pemekaran wilayah**, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan sinergi untuk:
 1. Penyusunan *grand design* yang mengatur arah kebijakan dan strategi pemekaran daerah serta proyeksi mengenai jumlah daerah otonom ideal di wilayah NKRI, hal ini menyangkut pengembangan kebijakan operasional yang seharusnya bisa dilakukan oleh departemen;
 2. Perlu disusun bersama metodologi yang dapat dikembangkan atau eksplorasi metode perencanaan untuk unit manajemen pemda secara obyektif dengan pendekatan daya dukung lahan (*carrying capacity*), penilaian dan prakiraan *gross margin* wilayah dan distribusi pendapatan (*income distribution*);
 3. Peningkatan dalam pengujian persyaratan teknis dan kelayakan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Kelancaran proses perencanaan dan penganggaran.

- Penataan dan penguatan kerangka perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan. Salah satu kebijakan yang ditempuh dalam RPJMN 2010-2014 adalah **restrukturisasi dan penataan instrumen pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah**. Dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) yang secara keseluruhan disebut dana perimbangan (DP) dan dana otonomi khusus (Dana Otsus) merupakan wujud konkret dalam hubungan pusat daerah terkait sistem penganggaran.
- Secara umum kebijakan alokasi dana perimbangan dan dana otonomi khusus diarahkan untuk:
 1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah;
 2. Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan;
 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah;
 4. Meningkatkan daya saing daerah;
 5. Mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro;
 6. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;
 7. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; dan
 8. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Lanjutan

- Dalam rangka **meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAU**, perlu upaya bersama Pusat dan daerah untuk:
 1. Mewujudkan seutuhnya fungsi DAU sebagai *block grant* belanja publik pemda menurut kewenangan;
 2. Menyusun formulasi DAU secara komprehensif yang mampu menggambarkan seluruh fungsi daerah dalam menunjang keutuhan nasional serta memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah dengan beban nasional, misalnya sebagai pusat prasarana vital dan strategis, pusat investasi, kawasan hutan lindung dan wilayah perbatasan yang belum diakomodasi dalam aspek legal.
- Dalam rangka **memanfaatkan efektivitas pelaksanaan DAK**, perlu upaya bersama Pusat-Daerah untuk:
 1. Sinergi perencanaan DAK antara daerah dengan departemen teknis untuk menjamin DAK diterima oleh daerah yang berhak menurut ketentuan;
 2. Memberi otoritas kepada Gubernur dalam pelaksanaan DAK sehingga masuk dalam APBD, serta menjamin efektivitas program dan kelancaran pelaporan;
 3. Sinkronisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan pusat sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

Lanjutan

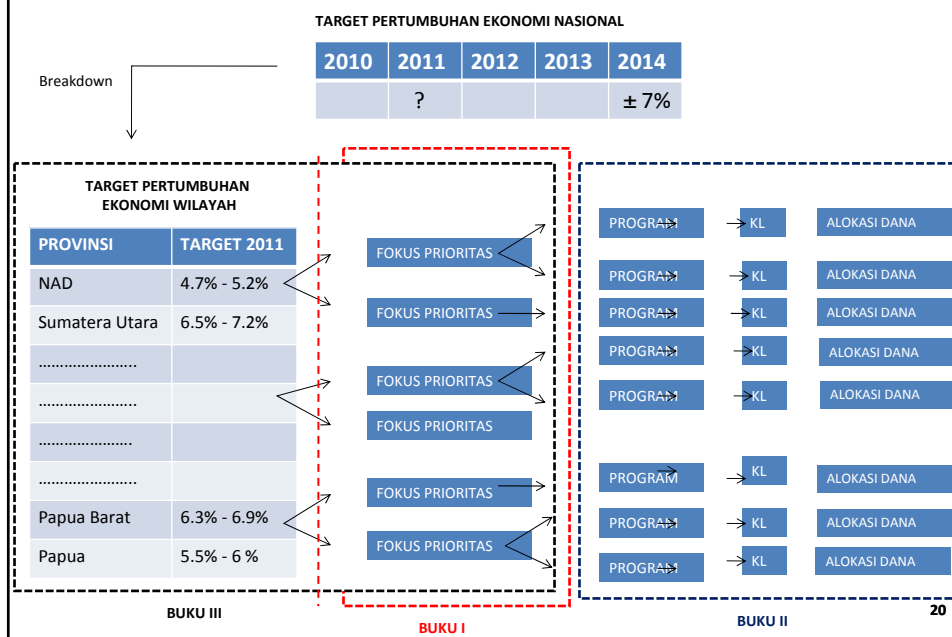
- Dalam rangka **efektivitas pelaksanaan DBH** untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemda (ketimpangan vertikal), Pemerintah Pusat-Daerah akan melakukan sinergi untuk:
 1. Menjamin keterbukaan informasi dan data dari pusat kepada daerah;
 2. Mempercepat penyaluran DBH sumber daya alam.
- Dalam rangka **menjamin efektivitas pemanfaatan dana dekonsentrasi** yang dialokasikan untuk mendukung agenda-agenda memperkuat pemda, meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintahan dan masyarakat, serta untuk mempertahankan integrasi nasional, Pemerintah Pusat-Daerah perlu melakukan sinergi untuk :
 1. Mempertegas kerangka organisasi dan personil pelaksana pemanfaatan dana dekonsentrasi;
 2. Sinkronisasi perencanaan program dekonsentrasi antara departemen teknis dan kepala daerah;
 3. Penentuan sasaran fungsional program secara bersama.

Lanjutan

- Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 yang baru saja selesai disusun, penerapan anggaran berbasis kinerja serta kerangka pengeluaran jangka menengah semakin diperkuat.
- Paradigma lama yaitu perencanaan dan pengusulan program kegiatan sebanyak-banyaknya sudah harus kita tinggalkan.
- Perencanaan program dan kegiatan belanja Kementerian/Lembaga sebaiknya diselaraskan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- Keterbatasan sumber daya yang kita miliki membutuhkan sinergi yang kuat dari pendanaan melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Ke depan, diharapkan kedudukan, peran dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas dan Bappeda-Bappeda provinsi serta hubungan kerja antar kedua lembaga perencanaan ini dapat menciptakan mekanisme saling bersinergi serta mendukung sebagai sarana *check and balances* dalam rangka mewujudkan target dan prioritas nasional dan daerah berdasarkan prinsip *good governance*.

SINKRONISASI BUKU I, II DAN III

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL



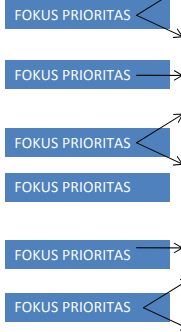
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN NASIONAL

TARGET PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN NASIONAL

	2010	2011	2012	2013	2014
Breakdown		?			8-10%

TARGET PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH

PROVINSI	TARGET 2011
NAD	19.3% - 18.8%
Sumatera Utara	9.8% - 9.4%
.....	
.....	
.....	
Papua Barat	32.0% - 31.0%
Papua	34.2% - 33.8%



BUKU III

BUKU I

BUKU II

21

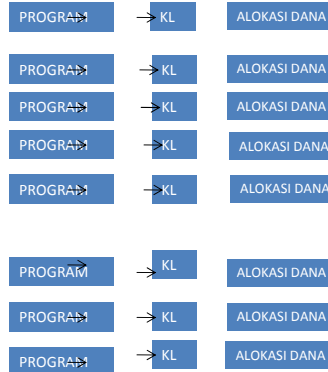
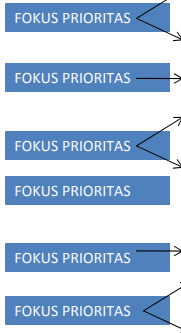
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENURUNAN TINGKAT PENGAGGURAN NASIONAL

TARGET PENURUNAN TINGKAT PENGAGGURAN NASIONAL

	2010	2011	2012	2013	2014
Breakdown		?			5-6%

TARGET PENURUNAN TINGKAT PENGAGGURAN WILAYAH

PROVINSI	TARGET 2011
NAD	7.8% - 7.0%
Sumatera Utara	11.2% - 10.1%
.....	
.....	
.....	
Papua Barat	7.4% - 6.8%
Papua	3.9% - 3.5%



BUKU III

BUKU I

BUKU II

22

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL (4)

**PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**PERTUMBUHAN EKONOMI
TAHUN 2011 (%)**

4.7% - 5.2%

Matriks Buku I		Matriks Buku II		
FOKUS PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR	K/L	ALOKASI DANA
Prioritas Nasional Penyederhanaan mekanisme perijinan.	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	BKPM	

**PENURUNAN KEMISKINAN
TAHUN 2011 (%)**

19.3% - 18.8%

Matriks Buku I		Matriks Buku II		
FOKUS PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR	K/L	ALOKASI DANA
Prioritas Nasional Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga (PKH, bantuan pangan, Jamkesmas, beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD).	Pembinaan Upaya Kesehatan	Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas	Kemendes	

**PENURUNAN PENGANGGURAN
TAHUN 2011 (%)**

7.8% - 7.0%

Matriks Buku I		Matriks Buku II		
FOKUS PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR	K/L	ALOKASI DANA
Prioritas Pulau Optimalisasi Balai latihan kerja	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas	Jumlah BLK yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi;	Kemenakertrans	

23

Matriks Buku II RPJMN 2010-2014 PER BIDANG (Matriks 2.2)

BIDANG HUKUM DAN APARATUR

FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	K L	ALOKASI DANA (Rp. Miliar)
			Rencana Tahun 2010	Rencana Tahun 2011	Target Tahun 2014			
Kegiatan Penguatan HAM	Diterapkannya perspektif HAM dalam pelaksanaan kegiatan pada semua bidang pembangunan	Jumlah program pembelajaran HAM.	40		200	Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	

BIDANG HUKUM DAN APARATUR

FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET			PROGRAM	KL	ALOKASI DANA	KET (DEKON/TP)
				Rencana Tahun 2011				
			Prov. Kalimantan Selatan						
			Prov. Jawa Barat						

JUMLAH ALOKASI DANA BIDANG HUKUM DAN APARATUR

Kementerian/Lembaga mencantumkan lokasi pada setiap program/kegiatan pada matriks Buku II RPJMN 2010-2014 (Matriks 2.2 (masing-masing bidang))

24

MATRIKS BUKU II RPJMN 2010-2014 PER KL (MATRIKS 2.3)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM						
PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI DANA
			Rencana Tahun 2010	Rencana Tahun 2011	Target Tahun 2014	
Kegiatan Penguatan HAM.	Presentasi KL pemerintah provinsi dan kabupaten/kotamadya telah mengikuti pelatihan HAM.	Jumlah program pembelajaran HAM.	40		200	

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM							
PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET		ALOKASI DANA	KET (DEKON/ TP)
				Rencana Tahun 2011		
			Prov. Papua			
			Prov. Papua Barat			
JUMLAH ALOKASI DANA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM						

Kementerian/Lembaga mencantumkan lokasi pada setiap program/kegiatan pada matriks Buku II RPJMN 2010-2014 (Matriks 2.3 (masing-masing KL))

25

MATRIKS BUKU III RPJMN 2010-2014

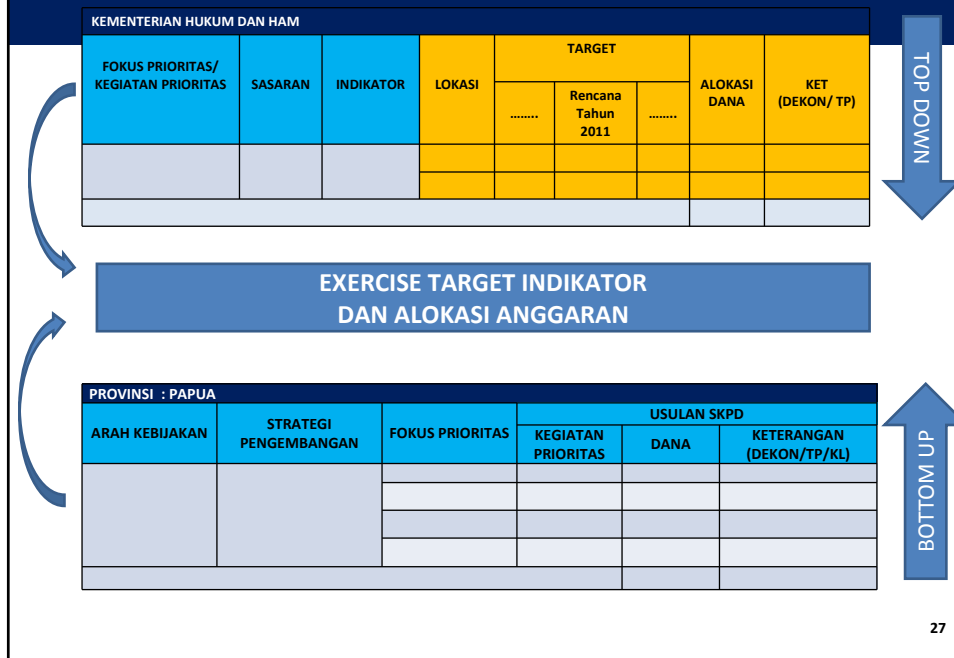
ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
Tingginya potensi pelanggaran hak asasi manusia berbasis ikatan adat dan komunal yang ditunjukkan oleh tingginya kasus kekerasan dan hak asasi manusia dan resiko konflik pertanahan di Provinsi Papua dan Papua Barat	Peningkatan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia	Papua Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal; Menghormati dan memperkuat lembaga adat; Meningkatkan kerja sama antara kepolisian dan pemeuka adat dalam penanganan konflik. 	Prioritas Nasional *Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik *Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen *Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

PROVINSI : PAPUA					
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS	USULAN SKPD		
			KEGIATAN PRIORITAS	DANA	KETERANGAN (DEKON/TP/KL)
Peningkatan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia	Melakukan reformasi birokrasi sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, dan efisien	Prioritas Nasional *Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik.			
JUMLAH DANA DEKON/TP WILAYAH PAPUA				(Dalam Rp. Miliar)	

Arah Kebijakan dan strategi pengembangan menjadi *guidance* bagi pusat dan daerah terkait usulan dari daerah dan rencana kegiatan KL pusat di daerah

26

MATRIKS BUKU II RPJMN 2010-2014 PER KL (MATRIKS 2.3)



TABEL HUBUNGAN MATRIKS BUKU I, II DAN III

WILAYAH	MATRIKS BUKU III			MATRIKS BUKU I			MATRIKS BUKU II		
	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	K/L	KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM
Prov. Papua	Peningkatan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal; • Menghormati dan memperkuat lembaga adat; • Meningkatkan kerja sama antara kepolisian dan pemuka adat dalam penanganan konflik. 	Prioritas Nasional •Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen •Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum •Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	PENGUATAN PERLINDUNGAN HAM Kegiatan Penguatan HAM	Jumlah program pembelajaran HAM.	Kemenkumham	Kegiatan Penguatan HAM	Jumlah program pembelajaran HAM.	Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Buku III

Buku I

Buku II

Penutup

Hasil awal yang diharapkan dari pertemuan ini adalah kerjasama yang harmonis dan produktif antara Bappenas – Bappeda Provinsi dan Antar Bappeda Provinsi se-KTI dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010 dan persiapan penyusunan RKP tahun 2011.

Sekian dan Terima kasih.